

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan dalam negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonominya, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbelakangan ekonomi yang menimpa negara berkembang. Hasil pembangunan ekonomi nasional dapat terlihat dari kesejahteraan ekonomi masyarakat, hal ini dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara pertumbuhan ekonominya pesat maka akan mempercepat prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi (Darman dan Muhammad, 2016).

Pembangunan ekonomi ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan usaha yang konsisten dari berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga diperlukan peran ekonomi regional untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah,

menjadi bukti kesungguhan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Menurut Adikrama (2016) menjelaskan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri secara optimal dan terintegrasi dengan cara bekerja sama dengan seluruh perangkatnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah itu sendiri. Pembangunan daerah dikatakan maju jika pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami peningkatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) itu sendiri adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Di Indonesia Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu: (a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, (b) pertambangan dan penggalan, (c) industri pengolahan, (d) pengadaan listrik dan gas (e) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (f) konstruksi, (g) perdagangan besar dan eceran, (h) transportasi dan pergudangan, (i) penyediaan akomodasi dan makan, (j) informasi dan komunikasi, (k) jasa keuangan dan asuransi, (l) real estate, (m) jasa perusahaan, (n) administrasi pemerintah, (o) jasa pendidikan, (p) jasa kesehatan dan (q) kegiatan sosial serta jasa lainnya. Dengan adanya peningkatan PDRB menjadi bukti bahwa otonomi daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menggali potensi-

potensi yang ada, potensi yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Adikrama, 2016).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang ibu kotanya berada di Semarang. Jawa tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 35.557.249 jiwa di tahun 2015. Pada tahun 2016 PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.849.383.564.590.000 dimana penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Jawa Tengah adalah dari sektor industri pengolahan sebesar Rp.296.227.398.370.000, kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar Rp.121.181.123.880.000, sementara itu yang menduduki posisi nomor tiga yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2016 yaitu sebesar Rp.116.250.931.530.000. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 hanya sebesar Rp113.826.299.040.000, sedangkan sektor yang menyumbang PDRB paling rendah di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang adalah sebesar Rp.589.805.230.000.

TABEL 1.1

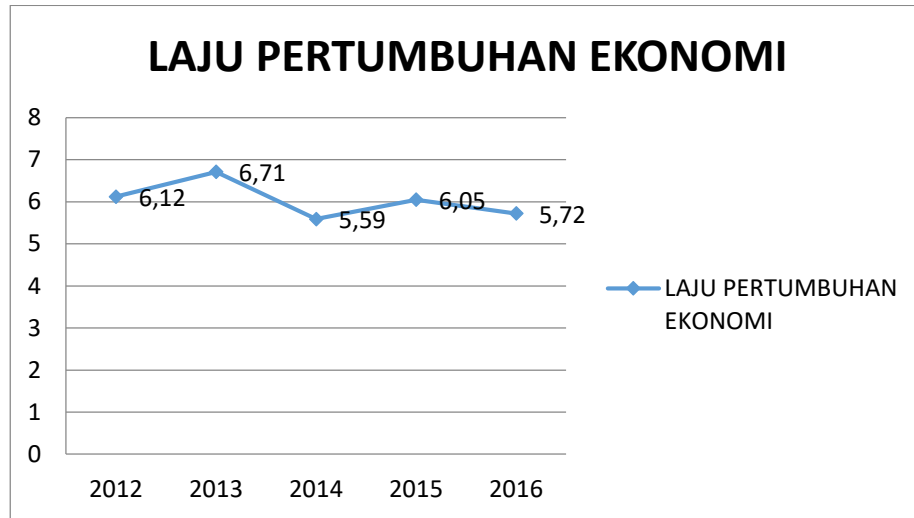
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2012-2016

Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	106,536,703.12	108,832,110.55	107,793,380.89	113,826,299.04	116,250,931.53
B	13,745,874.30	14,594,164.05	15,566,648.84	16,040,765.67	19,044,524.87
C	241,528,855.93	254,694,118.95	271,526,773.18	284,575,766.45	296,227,398.37
D	751,160.19	813,604.61	866,488.30	887,584.37	954,806.10
E	547,794.91	549,040.44	567,980.08	577,261.68	589,805.23
F	70,034,622.63	73,465,919.37	76,681,876.60	81,286,113.22	86,875,267.97
G	101,058,608.68	105,825,306.31	110,899,193.58	115,299,085.85	121,181,123.88
H	20,818,468.63	22,760,150.97	24,868,280.75	26,807,881.97	28,592,166.82
I	20,871,604.64	21,812,570.05	23,471,641.07	25,064,275.14	26,668,736.81
J	24,690,219.27	26,663,583.07	30,130,161.63	33,001,271.38	35,742,555.91
K	18,588,738.12	19,311,454.80	20,106,851.64	21,719,194.85	23,820,513.19
L	11,934,423.12	12,853,218.11	13,776,863.54	14,822,295.08	15,829,477.85
M,N	2,087,130.46	2,340,118.40	2,526,615.62	2,741,142.86	3,032,330.20
O	20,373,579.95	20,912,828.39	21,075,646.54	22,194,694.80	22,720,443.65
P	22,760,883.69	24,930,587.32	27,266,220.07	29,324,081.90	31,563,635.32
Q	4,959,375.94	5,312,609.80	5,916,710.61	6,307,617.26	6,929,495.92
R,S,T,U	10,055,072.38	10,983,732.87	11,917,818.01	12,300,030.67	13,360,350.97
PDRB	691,343,115.96	726,655,118.06	764,959,150.95	806,775,362.19	849,383,564.59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017), diolah

Keterangan: A = sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, B = sektor pertambangan dan penggalian, C = sektor industri pengolahan, D = sektor pengadaan listrik dan gas, E = sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, F = sektor konstruksi, G = sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, H = sektor transportasi dan pergudangan, I = sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, J = sektor informasi dan komunikasi, K = sektor jasa keuangan dan asuransi, L = sektor real estate, M,N = sektor jasa perusahaan, O = sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, P = sektor jasa pendidikan, Q = sektor jasa kesehatan dan kegiatan social, RSTU = sektor jasa lainnya.

Sragen merupakan Kabupaten yang berada diposisi paling timur Provinsi Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), yang memiliki luas wilayah sebesar 941.55 kilometer persegi dengan ketinggian rata-rata 109 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan data tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 879.027 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai sebesar 934 per kilometer persegi. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif, pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen sebesar 6.12% dan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 6.71%. Tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen tidak lama karena pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5.59% dan tahun 2015 meningkat kembali di angka 6.05%. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tertinggi nomor empat di Provinsi Jawa Tengah setelah Blora, Tegal dan Banyumas yaitu sebesar 5.72%.

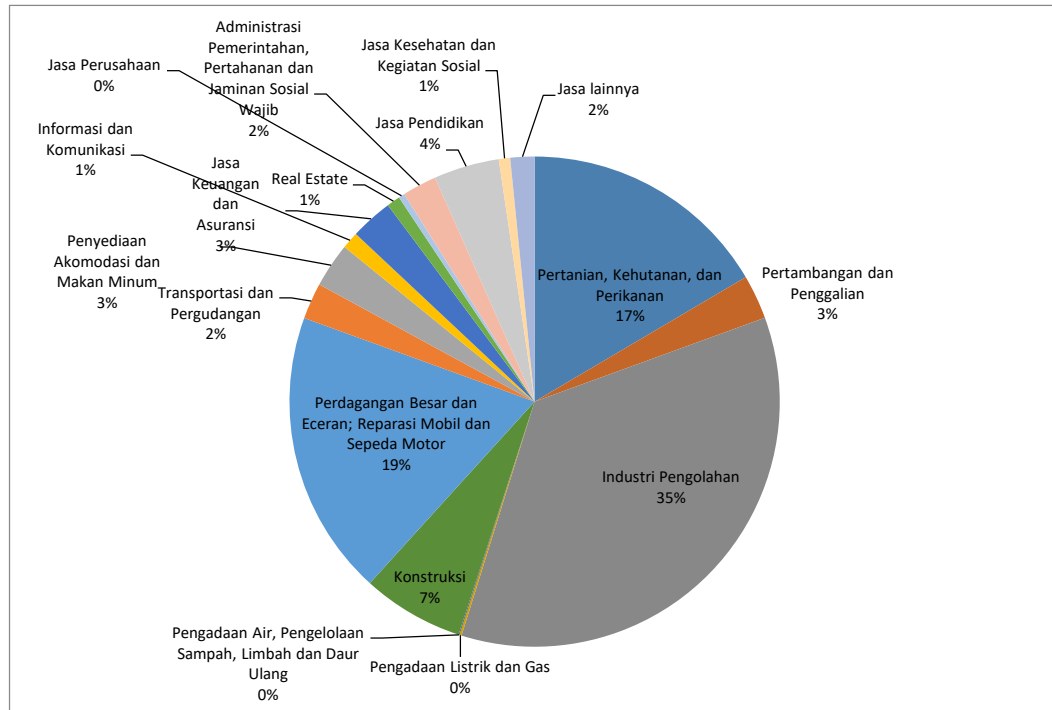


Sumber: BPS Kabupaten Sragen (2017), diolah

GAMBAR 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016 penyumbang terbesar PDRB ADHK Kabupaten Sragen terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar 35%. Selanjutnya penyumbang PDRB ADHK Kabupaten Sragen yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 19%, serta penyumbang PDRB ADHK Kabupaten Sragen selanjutnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 17%. Hal ini dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Sragen (2017), diolah

GAMBAR 1.2

Kontribusi Kategori/Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sragen Tahun 2016

Perubahan struktur ekonomi merupakan sebuah akibat dari aktifitas ekonomi yang terus berjalan secara berkesinambungan. Pada tahun 2012 – 2016 peranan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 20% menjadi 17%, sementara itu peranan industri pengolahan terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 – 2016 dari 30% menjadi 35%, hal ini terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir ini adanya kemudahan dalam hal perizinan mendirikan usaha serta bertambah banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen sehingga banyak pembangunan pabrik-pabrik yang berskala besar.

Kabupaten Sragen merupakan kabupaten yang memiliki potensial karena didukung dengan akses jalan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur membuat ekonomi Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan, hal ini juga didorong dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan jumlah tenaga kerja yang terus mengalami peningkatan pula. Meskipun Kabupaten Sragen pada tahun 2016 menempati urutan keempat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, namun terjadi kesenjangan dalam pemerataan pendapatan karena Kabupaten Sragen masih termasuk dalam 15 daerah zona merah kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sangat penting untuk diadakannya suatu penelitian, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sragen Tahun 2012 – 2016.**”

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini supaya lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik penelitian, maka peneliti membatasi masalah pada pengkajian sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Sragen dengan pendekatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2012 : 01 – 2016 : 12.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan sektor ekonomi manakah yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Sragen?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor ekonomi manakah yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sragen untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Sragen, menggunakan empat pendekatan yaitu LQ, *Shift Share*, MRP dan Overlay.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggali potensi sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sragen serta dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen.
- 2) Dari penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun dan mengetahui sektor unggulan dan basis di Kabupaten Sragen.

- 3) Untuk peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana implementasi dan penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh pada saat kuliah.
- 4) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dari penelitian dapat menambah informasi berupa sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk mendorong melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.